



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

**TELUKBETUNG**

A 0000466



Kode Pos : 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 463/73/PB /A 0000466/V.16/2020

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 PURBOLINGGO**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarana, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kapala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Purbolinggo,Kabupaten Lampung Timur dengan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Multimedia, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

**Mengingat**

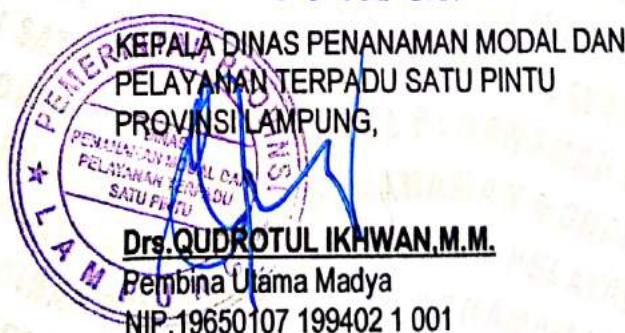
- 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
- Surat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purbolinggo Nomor : 420/18.05/PER/03/V/SMKN/2020 tanggal 18 Mei 2020 hal Permohonan Izin Operasional.
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/1686/V.01/DP.3/2020 tanggal 25 Juni 2020 hal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMK Negeri 1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Negeri 1 Purbolinggo,yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit Desa Tegal Gondo, Kec. Purbolinggo,Kabupaten Lampung Timur;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **08 JUL 2020** s.d **08 JUL 2023**
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK Negeri 1 Purbolinggo tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaranya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **08 JUL 2020**



**Tembusan :**

- Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- Gubernur Lampung
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.
- Arsip